

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Data menunjukkan bahwa realisasi pemungutan PBB P2 seringkali tidak sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021-2023. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu penyebab utamanya adalah akurasi data objek pajak yang rendah. Data yang tidak mutakhir atau tidak lengkap mengakibatkan target penerimaan PBB P2 yang ditetapkan dalam Perda menjadi tidak realistis sejak awal. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan kesadaran wajib pajak juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran. Banyak wajib pajak mungkin tidak memahami kewajiban mereka atau prosedur pembayarannya.

Faktor lain yang berperan adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya upaya penagihan yang efektif atau sanksi yang tegas bagi penunggak pajak dapat mengurangi insentif wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan PBB P2 juga dapat menjadi kendala.

Dampak dari ketidaksesuaian ini adalah terganggunya stabilitas keuangan daerah. Pendapatan PBB P2 yang tidak mencapai target akan menghambat pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan dalam APBD. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan komprehensif dalam pengelolaan PBB P2, mulai dari pembaruan data, peningkatan sosialisasi, hingga penguatan mekanisme penagihan dan penegakan hukum, agar realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada

1. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

Data objek pajak harus dimutakhirkan secara berkala dan akurat, ini mencakup pendataan ulang, verifikasi lapangan, dan integrasi data dengan instansi terkait. Data yang valid akan menghasilkan target penerimaan yang lebih realistis dan mempermudah identifikasi wajib pajak. Kedua, intensifkan sosialisasi dan edukasi wajib pajak. Banyak wajib pajak mungkin belum memahami kewajiban, manfaat pembayaran pajak, atau kemudahan akses pembayaran. Kampanye edukasi yang berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk digital, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selanjutnya, perkuat sistem pengawasan dan penagihan. Ini bisa berarti pembentukan tim penagih yang lebih proaktif, penerapan sanksi yang tegas namun proporsional bagi penunggak pajak, dan pemanfaatan teknologi untuk memantau status pembayaran. Sistem informasi yang terintegrasi akan sangat membantu dalam melacak tunggakan dan mengirimkan notifikasi. Terakhir, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan PBB P2 melalui pelatihan berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat wajib pajak

Pahami Manfaat Pajak dan Bumi dan Bangunan Ketahui bahwa PBB-P2 yang di bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, Penuhi Kewajiban Pembayaran Tepat Waktu dan ikut serta dalam proses sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan